



KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT



PERCEPATAN INVENTARISASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL BINJAILANGSA DI DESA HALABAN, MELALUI PEMBERDAYAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023.



PROJECT LEADER:

RAHMAT, S.H., M.H.

**KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN
KANTAH KAB. LANGKAT**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, petunjuk, serta hidayah yang telah diberikan- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan yang merupakan salah satu syarat dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2023 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P. selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/ BPN.
2. Ibu Nunung Nurhidayah, S.Pd, M.A.P. selaku Widyaiswara PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan sekaligus pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kegiatan Rancangan Aksi Perubahan ini.
3. Bapak Syafrizal Pane, S.H. selaku mentor dan sekaligus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, atas dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Para Pengajar/Widyaiswara dan Penyelenggara pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2023 PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta banyak membantu penulis selama masa pelatihan.
5. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV yang telah bekerjasama dan banyak membantu penulis dalam kegiatan pelatihan ini.

Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian Rancangan Aksi Perubahan ini. Penulis menyadari bahwa Rancangan Aksi Perubahan ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran penulis harapkan agar Rancangan Aksi Perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

B O G O R, OKTOBER 2023

Penulis



RAHMAT, S.H., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

Rancangan Aksi Perubahan :

Nama Peserta : Rahmat, S.H. M.H.
NIP : 197205231993031005
Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat

Judul Rancangan Aksi Perubahan :

Percepatan Pelaksanaan Inventarisasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Binjai-Langsa di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Melalui Pemberdayaan Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Telah di seminarikan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Untuk selanjutnya diimplementasikan aksi perubahan pada saat *off class* mulai 4 Agustus 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023.

COACH

Nunung Nurhidayah, S.Pd, M.A.P
NIP. 19790914 200212 2 003



MENTOR

Drs. M. Alwy, M.Si
NIP. 19671016 199403 1 002



DAFTAR ISI

**BAB I DESKRIPSI SINGKAT
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN**

**BAB II DESKRIPSI PROSES
KEPEMIMPINAN**

**BAB III DESKRIPSI HASIL
KEPEMIMPINAN**

**BAB IV KETERKAITAN DENGAN
MATA PELATIHAN PILIHAN**

**BAB V DISEMINASI DAN PUBLIKASI
AKSI PERUBAHAN**

**BAB VI KEBERLANJUTAN AKSI
PERUBAHAN**

**BAB VII PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN POTENSI DIRI**

BAB VIII PENUTUP



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Imam Bonjol No.2, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat Telp. (061) 8910577 email kantahlangkat@gmail.com

NOTA DINAS
NO: 14-ND-12.05/VI/2023

Kepada Yth. : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dan Staff
Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
Tanggal : 15 Juni 2023
Perihal : Mohon Berkoordinasi Untuk Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Desa Halaban.

Sehubungan dengan adanya Surat dari Gubernur Sumatera Utara Nomor: 03/SAG/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PSN Provinsi Sumatera Utara dengan ini diminta kepada Saudara dan Tim untuk berkoordinasi dengan Tim yang dibentuk sebagaimana tersebut didalam surat di atas (surat terlampir) untuk percepatan Pelaksanaan Inventarisasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Binjai - Langsa di Desa Halaban.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.



Syafrizal Pane, S.H.
NIP. 19660110 198603 1 003



Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selaku Mentor penulis yang memerintahkan kepada Penulis selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan agar melakukan koordinasi (bantuan) dengan Panitia Percepatan Proyek Strategis Nasional Provinsi Sumatera Utara agar dapat bekerja sama untuk percepatan invent pengadaan tanah Jalan Tol Binjai-Langsa di Desa Halaban.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon 4156000
MEDAN

Nomor : 03/SAG/1/2023
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Nama

Medan, 06 Januari 2023
Kepada Yth.
Bapak Ka Kanwil BPN Provsu
(sebagai Ketua P2T)
di
Tempat.

Bersama ini disampaikan nama-nama dari Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PSN Provsu yang turut dalam Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagai berikut :

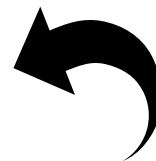
- Nama : Harianto Butar-Butar, SE, M.Si
NIP. : 19680916 199503 1 005
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Staf Ahli Gubsu Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA
- Nama : Dr. H. Agus Tripriyono, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. : 19640819 198503 1 003
Pangkat / Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprovsu
- Nama : Fachrizal S.Sos, MM
Jabatan : Anggota Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PSN Provsu

Demikian disampaikan untuk maklum.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH
Ub.
STAF AHLI GUBSU BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN, PEMBANGUNAN, ASET DAN SDA
SELAKU KETUA TIM KOORDINASI
PERCEPATAN PELAKSANAAN PSN PROVSU



HARIANTO BUTAR-BUTAR, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680916 199503 1 005

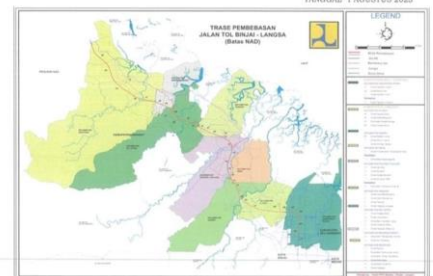


Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara tentang Penunjukan Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PSN Prov. Sumatera Utara.

Peta Penetapan Lokasi Trase Jalan Tol Binjai-Langsa.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.41/593/KP/PS/2023
TANGGAL 1 AGUSTUS 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
DHARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
td
EDY RAHMAYADI

SUSUNAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN PERCEPATAN INVENTARISASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL BINJAI-LANGSA MELALUI TIM KOORDINASI PERCEPATAN PSN MELALUI PEMBERDAYAAN TIM (MOHON BANTUAN) DARI TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA.



MENTOR

Drs. M. ALWY, M.Si



PROJECT LEADER

RAHMAT, S.H., M.H.

ANGGOTA :



Nopa Rasita Br. Barus, S.P.



Bayu Sinurat, S.H.



Khairi FACHROZI, S.E.



Anisya, S.H.

BAB I

DESKRIPSI SINGKAT RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

Pengadaan Tanah yang ada di Negara Republik Indonesia ini pada umumnya, dan di Kabupaten Langkat pada khususnya yaitu Pengadaan Tanah Jalan Tol Binjai-Langsa mengacu pada Undang-Undang No.2 Tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang disertai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021.

Dalam rangka memenuhi harapan para pemangku kepentingan suatu unit organisasi maka perlu meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan hasil rumusan umum Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 6-9 Maret 2023, dimana salah satunya mengenai transformasi digital yang memerlukan penguatan faktor policy (kebijakan), people (orang) dan teknologi serta melakukan diagnosa kedalam agar penyediaan layanan secara elektronik dapat menjawab kebutuhan pemangku kepentingan.

Pengadaan tanah untuk pembebasan tanah Jalan Tol Binjai Langsa di Kabupaten Langkat terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Desa dan 8 (delapan) Kecamatan. Jumlah bidang tanah yang terkena trase Jalan Tol Binjai Langsa tersebut diperkirakan sekitar 1.353 bidang tanah dengan total luas 973,10 Hektar, sedangkan yang telah diselesaikan Inventarisasinya sejumlah 927 bidang tanah dengan total luas 685,95 Hektar.

Penulis dalam kesempatan ini mengangkat Desa Halaban, Kecamatan Besitang di Kabupaten Langkat untuk memfokuskan aksi perubahan terhadap percepatan Inventarisasi tersebut adalah karena pelaksanaan Inventarisasi tanah yang ada Desa Halaban tersebut sudah terlalu lama yakni dimulai sejak tahun 2020. Sementara estimasi waktu penyelesaian Inventarisasi pengadaan tanah setiap satu desa sekitar enam sampai sepuluh bulan.

Saat ini penulis bertugas sebagai Kepala seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.

Dalam pelaksanaan tugas Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, kami mengidentifikasi 4 (empat) isu strategis, yaitu :

1. Banyaknya keberatan dari Masyarakat terkait invent tanah, bangunan dan tanaman.
2. Adanya ketidak sesuaian antara peta bidang tanah yang dikeluarkan Satgas A dengan trase yang ditetapkan oleh pihak kontraktor pembuat infrastruktur Jalan Tol.
3. Terbatasnya kewenangan Satgas A dan Satgas B untuk bertindak lebih leluasa untuk percepatan Inventarisasi.
4. Rendahnya pemahaman Masyarakat terkait mempersiapkan alas hak/surat tanah untuk diserahkan kepada petugas invent dalam rangka pendataan yuridis.

Isu paling utama yang harus ditindaklanjuti dengan aksi perubahan adalah rendahnya pemahaman Masyarakat terkait apa-apa yang harus dipersiapkan dari Masyarakat untuk pelaksanaan invent pengadaan tanah di Desa Halaban. Adapun faktor penyebabnya adalah :

1. Kurangnya pengetahuan dari Masyarakat tentang administrasi penghadan tanah, dan juga keegoisan Masyarakat terhadap tanahnya yang terkena lokasi pengadaan tanah,
2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang invent pengadaan tanah, serta kurangnya sinergitas antara pemangku kepentingan.
3. Tertib administrasi pengadaan tanah di Desa masih merupakan hal yang asing.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan yang ada kami melakukan Upaya aksi perubahan dengan judul :

PERCEPATAN INVENTARISASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL BINJAI-LANGSA DI DESA HALABAN, MELALUI PEMBERDAYAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA.

Dari judul terkait diatas penulis berupaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir atau menghilangkan keterlambatan invent yang disebabkan oleh kendala dan masalah yang timbul di Masyarakat dalam pelaksanaan inventarisasi pengadaan tanah Jalan Tol Binjai-Langsa yang berlangsung di Desa Halaban.

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas

Secara Etimologis, integritas berasal dari Bahasa Latin integer yang artinya seluruh. Menurut KBBI integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Dari dua pengertian dasar tersebut maka sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa kebutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan.

Membangun integritas dalam proses kepemimpinan melalui koordinasi untuk bekerjasama dengan Tim Koordinasi Percepatan Proyek Strategis Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam rangka percepatan Inventarisasi Pengadaan Tanah di Desa Halaban.

Berikut adalah beberapa Langkah yang diambil dalam pelaksanaan percepatan Invent Pengadaan Tanah di Desa Halaban.

1. Pemahaman yang kuat tentang peraturan dan regulasi yang mengatur tentang pengadaan tanah. Ini akan membantu dalam memahami hak kewajiban yang terkait dengan kepemimpinan dan percepatan Inventarisasi bidang tanah.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang Inventarisasi tanah dan Teknik kerja sama antar tim dalam pelaksanaan percepatan pengadaan tanah.
3. Sosialisasi kepada masyarakat yang tanahnya terkena trase/lokasi pengadaan tanah agar dapat saling bekerja sama dengan tim untuk percepatan Inventarisasi.

4. Mengadakan pelatihan dan koodinasi mengenai Teknik kerja antar sesame tim.
5. Menjadikan Kantor Desa sebagai kantor perwakilan tim dalam pelaksanaan invent kelokasi lahan yang dalam pelaksanaan inventarisasi.
6. Fasilitasi dialog antar semua pihak yang terlibat/terkait dalam Inventarisasi Pengadaan Tanah melalui kegiatan rapat-rapat, baik itu rapat koordinasi maupun rapat evaluasi.
7. Memastikan dialog antar semua pihak yang terlibat/terkait yang dilakukan sudah benar-benar dipahami dan dimengerti bagi semua tim untuk diterpkan pelaksanaannya dilapangan.
8. Setelah diperoleh langkah-langkah kerja yang akan dilaksanakan dari hasil dialog/rapat tersebut pastikan masing-masing pihak telah benar-benar melakukan itu sesuai dengah hasil yang diputuskan.
9. Evaluasi berkala terhadap kegiatan Inventarisasi Pengadaan Tanah, agar dapat di identifikasi area mana yang perlu diperbaiki dan dilakukan Langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
10. Dalam aksi perubahan project leader berusaha membangun integritas yang ditanamkan mulai dari awal kegiatan yaitu dari rapat persiapan dan pemetaan potensi lokasi pengadaan tanah dimana project leader mengemukakan alasan aksi perubahan dan kaitannya dengan "Percepatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Binjai-Langsa di Desa Halaban"

KEGIATAN PROSES KEPEMIMPINAN



Rapat Persiapan dan Pemetaan Potensi Hambatan-Hambatan Inventarisasi.
Dalam aksi perubahan project leader berusaha membangun integritas yang ditanamkan mulai dari awal kegiatan yaitu rapat persiapan dan pemetaan potensi hambatan-hambatan dan kendala yang timbul dalam kegiatan Inventarisasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Binjai-Langsa khususnya di Desa Halaban.



Rapat persiapan dan pemetaan potensi hambatan-hambatan inventarisasi pengadaan tanah Jalan Tol Binjai Langsa ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Peranahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Bapak Askani, S.H.,M.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, juga diikuti oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah, Ibu Khoirun Nisak, S.H., M.H. dan Ibu Wirna Sari, S.Sos, M.H. beserta Tim, selaku Panitia Pengadaan Tanah dan juga diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Binjai-Langsa.



Rapat Persiapan juga dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumatera Utara yang dipimpin oleh Bapak Harianto Butar-Butar, S.E., M.Si.Ak, CA, selaku Ketua Tim Percepatan Proyek Strategis Nasional Provinsi Sumatera Utara.

NOTA DINAS

Rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dalam bentuk Nota Dinas untuk berkoordinasi untuk memberdayakan Tim Koordinasi Percepatan Proyek Strategis Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Percepatan Inventarisasi Pengadaan Tanah di Desa Halaban, Kecamatan Besitang.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Imam Bonjol No.2, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat Telp. (061) 8910577 email kantahlangkat@gmail.com

NOTA DINAS

NO: 14 -ND-12.05/VI/2023

Kepada Yth. : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dan Staff
Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
Tanggal : 15 Juni 2023
Perihal : Mohon Berkoordinasi Untuk Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Desa Halaban.

Sehubungan dengan adanya Surat dari Gubernur Sumatera Utara Nomor: 03/SAG/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PSN Provinsi Sumatera Utara dengan ini diminta kepada Saudara dan Tim untuk berkoordinasi dengan Tim yang dibentuk sebagaimana tersebut didalam surat di atas (surat terlampir) untuk percepatan Pelaksanaan Inventarisasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Binjai - Langsa di Desa Halaban.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.



Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Langkat

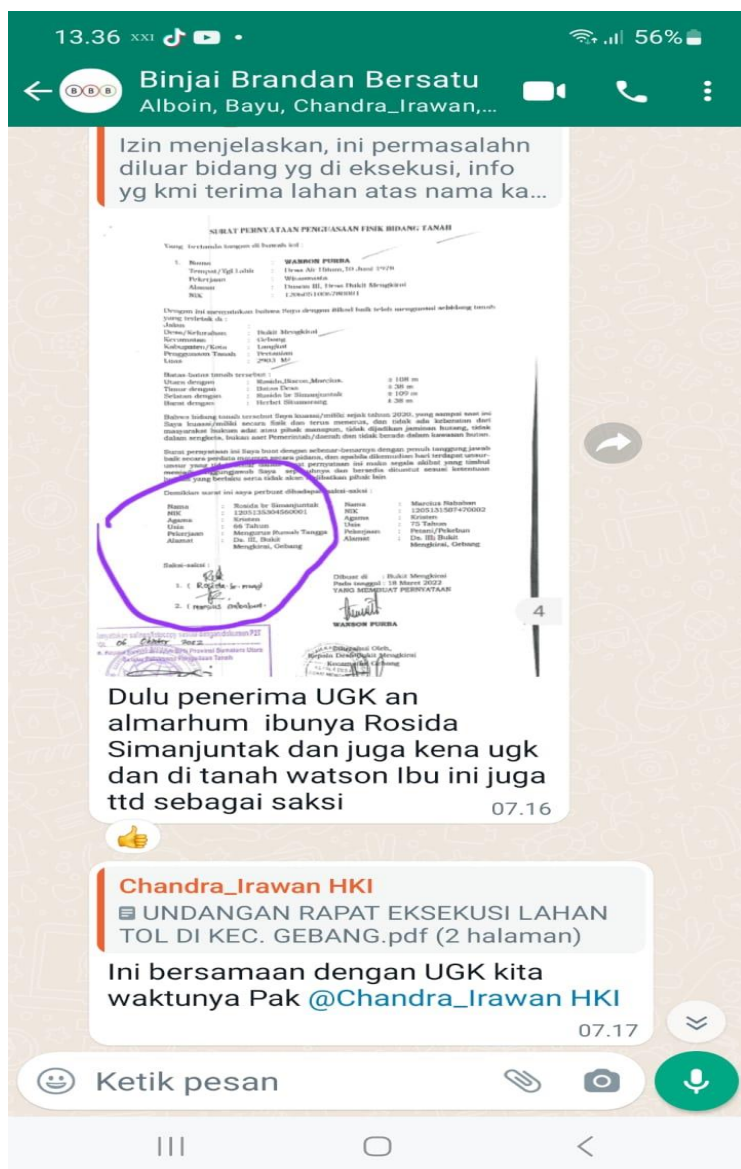
Syafrizal Pane, S.H.

NIP. 19660110 198603 1 003

B. PENGELOLAAN BUDAYA PELEYANAN BERUPA PEMANFAATAN IT

Seluruh instansi Pemerintah dibentuk untuk melayani Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian Aparatur Sipil Negara yang bekerja didalamnya merupakan pelayan/abdi Masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kementerian ATR/BPN yang telah diterapkan yakni Melayani, Profesional dan Terpercaya.

Dalam hal ini untuk mengetahui keluhan-keluhan ataupun masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan inventarisasi pengadaan tanah di Desa Halaban maka dibuatlah suatu wadah yang menampung untuk itu dimana wadan terbut dalam bentuk WA Grup yang anggota terdiri dari Panitia Pengadaan Tanah, Ketua Tim Percepatan PNS Sumut, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah, Stake Holder yang mewakili dari Masyarakat yaitu para kepala dinas beserta jajarannya, Camat, Kepala Desa. Dan juga Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B.



Pada Aksi Perubahan ini, setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi percepatan selalu dimuat dalam wadah WA Grup agar seluruh anggota di Grup tersebut mengetahui perkembangan dan progress percepatan pengadaan tanah di Desa Halaban tersebut.

Berikut dokumentasi penyelesaian kendala terhadap pelaksanaan Inventarisasi Pengadaan Tanah di Desa Halaban.



Tim Panitia memaparkan adanya salah letak Peta Bidang yang telah diterbitkan oleh Satgas A yang terletak di Desa Halaban.



Pemaparan Daftar Nominatif dan PBT yang Salah letak oleh Panitia Pengadaan Tanah.



Rapat yang dipimpin oleh Ibu Kepala Bidang Penghadaan Tanah selaku Panitia dan merangkap Tim Percepatan Invent PSN Jalan Tol Binjai Langsa.



Rapat yang dihadiri oleh Mentor (Kepala-Kantor) beserta Ketua dan Anggota dari Satgas A dan Satgas B

C. PENGELOLAAN TIM

Pada tahapan implementasi aksi perubahan diawali dengan pembentukan tim efektif yang diberi tanggung jawab mengawal aksi berjalannya kegiatan aksi perubahan sesuai dengan yang telah direncanakan sesuai kapasitas masing-masing anggota yang saling melengkapi. Legalitas Tim Efektif berupa Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No. 14-ND-12.05/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang perintah untuk berkoordinasi (memohon bantuan) dalam hal pelaksanaan percepatan Inventarisasi Pengadaan Tanah di Desa Halaban melalui Pemberdayaan Tim Koordinasi Percepatan PSN Provinsi Sumatera Utara.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Imam Bonjol No.2, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat Telp. (061) 8910577 email kantahlangkat@gmail.com

NOTA DINAS

NO: 14 -ND-12.05/VI/2023

Kepada Yth. : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dan Staff
Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
Tanggal : 15 Juni 2023
Perihal : Mohon Berkoordinasi Untuk Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Desa Halaban.

Sehubungan dengan adanya Surat dari Gubernur Sumatera Utara Nomor: 03/SAG/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PSN Provinsi Sumatera Utara dengan ini diminta kepada Saudara dan Tim untuk berkoordinasi dengan Tim yang dibentuk sebagaimana tersebut didalam surat di atas (surat terlampir) untuk percepatan Pelaksanaan Inventarisasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Binjai - Langsa di Desa Halaban.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.



Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Langkat

Syaffrizal Pane, S.H.
NIP. 19660110 198603 1 003

Pengelolaan tim yang efektif terhadap proses kepemimpinan dalam rangka sosialisasi inventarisasi pengadaan tanah sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Memastikan komunikasi yang terbuka, jelas dan teratur antara anggota tim. Tetap terhubung melalui rapat/pertemuan rutin, diskusi langsung atau dengan WA grup, yang tujuannya untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting dapat dengan mudah disampaikan dan dipahami oleh seluruh anggota tim.

Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota tim. Pastikan setiap anggota memahami tugas mereka dan kontribusi yang diharapkan dari mereka dalam proses sosialisasi pengadaan tanah. Mendorong kolaborasi antara anggota tim dengan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan saling mendukung. Fasilitasi pertukaran ide, masukan, dan penyelesaian masalah secara kolektif untuk mencapai hasil yang lebih baik dan optimal.

Pengawasan dan evaluasi kinerja tim secara teratur dan melakukan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan untuk menggalang Kerjasama dengan Tim Koordinasi Percepatan PSN Provinsi Sumatera dapat berjalan dengan baik dan optimal.

RAPAT EVALUASI



Rapat Evaluasi Tim Efektif juga dihadiri oleh Ketua beserta Anggota Satgas A dan Panitia Pengadaan Tanah dari Kanwil BPN Prov. Sumatera Utara.



Rapat Evaluasi Tim Efektif yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantah Kabupaten Langkat, selaku Ketua Satgas B Pengadaan Tanah Jalan Tol Binjai-Langsa.

RAPAT EVALUASI SOSIALISASI PELAKSANAAN PERCEPATAN INVENT PENGADAAN TANAH DI DESA HALABAN.



BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Tujuan dari percepatan invent pengadaan tanah di Desa Halaban adalah untuk mencapai penyelesaian Peta Bidang serta Daftar Nominatif yang lengkap dan tercover seluruh trase bidang tanah yang terkena lokasi penghadaan tanah Jalan Tol Binjai-Langsa di Desa Halaban.

Melalui koordinasi dengan tim percepatan yang efektif, untuk dapat membangkitkan kesadaran Masyarakat Desa Halaban dan stake holder tentang pentingnya percepatan pengadaan tanah di Desa Halaban.

Selaian Langkah koodinasi ditempuh juga langka dengan sosialisasi yang baik, sistem pelayanan invent pengadaan juga dapat mengalami perbaikan dalam penyelesaian kendala. Masyarakat akan lebih mudah bertemu langsung dengan petugas agar dapat memahami prosesnya pengadaan tanah, dan merasa terlibat dalam penyelesaian invent tersebut. Ini dapat mengurangi miss komunikasi dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan invent yang tertunda. Dan melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan invent. Masyarakat akan lebih aktif dalam memberikan masukan, menyampaikan kekhawatiran, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan adanya partisipasi yang lebih besar akibat adanya sosialisasi langsung ke Masyarakat maka akan dipoeroleh sistem pelaksanaan invent dapat menjadi entatif, dan responsif terhadap kebutuhan dan akat.

Melalui sosialisasi Inventarisasi, dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pekerjaan. Masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses inventarisasi, melindungi hak-hak mereka, dan standar yang diterapkan. Hal ini dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga atau institusi yang melaksanakan inventarisasi, dapat mendorong perbaikan dalam efisiensi dan kualitas pelayanan inventarisasi tanah.

Informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk meyakinkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang langkah- langkah yang perlu diambil. Hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang lebih efisien, responsif, dan berkualitas tinggi dalam inventarisasi pertanahan. Serta melalui sosialisasi pengadaan tanah di Desa Halaban.

Tabel Indikator Perbaikan Kualitas Pelayanan

No.	Indikator Perbaikan Kualitas Pelayanan	Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi
1.	Kesederhanaan dan jangka waktu	Rumit karena proses inventarisasi memakan waktu dan biaya	Solusi yang lebih cepat dan hemat biaya
2.	Kejelasan dan kepastian	Langkah pelaksanaan menyebabkan ketidak pastian	Menghasilkan solusi yang baik dan tepat waktu dalam pelaksanaan
3.	Kepuasan	Masyarakat merasa ada yang tidak transparan terhadap pelaksanaan inventarisasi	Meningkatkan kepercayaan masyarakat
4.	Hubungan dengan masyarakat	Saling tidak cocok antara tim inventarisasi dengan masyarakat	Terjalinnya hubungan yang baik antara tim inventarisasi dengan masyarakat
5.	Pendataan hasil inventarisasi	Setiap hasil inventarisasi yang dibuat tim Masyarakat tidak setuju menerimanya	Masyarakat percaya dan setuju serta menandatangani hasil inventarisasi yang dibuat oleh tim.

Evidence Dukungan dari Mentor dan Stkeholder Eksternal



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Imam Bonjol No.2, Kwala Bingal, Stabat, Kabupaten Langkat Telp. (061) 8910577 email kantahlangkat@gmail.com

NOTA DINAS

NO: 14 -ND-12.05/VI/2023

Kepada Yth. : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dan Staff
Dari : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
Tanggal : 15 Juni 2023
Perihal : Mohon Berkoordinasi Untuk Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Desa Halaban.

Sehubungan dengan adanya Surat dari Gubernur Sumatera Utara Nomor: 03/SAG/1/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PSN Provinsi Sumatera Utara dengan ini diminta kepada Saudara dan Tim untuk berkoordinasi dengan Tim yang dibentuk sebagaimana tersebut didalam surat di atas (surat terlampir) untuk percepatan Pelaksanaan Inventarisasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Binjai - Langsa di Desa Halaban.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.



Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Langkat

Syafrizal Pane, S.H.

NIP. 19660110 198603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon 4156000

M E D A N

Nomor : 03/SAG/1/2023

Medan, 06 Januari 2023

Lampiran : -

Kepada Yth.

Perihal : Penyampaian Nama

Bapak Ka. Kanwil BPN Provsu

(sebagai Ketua P2T)

di

Tempat.

Bersama ini disampaikan nama-nama dari Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PSN Provsu yang turut dalam Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagai berikut :

1. Nama : Harianto Butar-Butar, SE, M.Si
 NIP. : 19680916 199503 1 005
 Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan : Staf Ahli Gubsu Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA
2. Nama : Dr. H. Agus Tripriyono, SE, M.Si, Ak, CA
 NIP. : 19640819 198503 1 003
 Pangkat / Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
 Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprovsu
3. Nama : Fachrizal S.Sos, MM
 Jabatan : Anggota Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PSN Provsu

Demikian disampaikan untuk maklum.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
 SEKRETARIS DAERAH

Ub.

STAF AHLI GUBSU BIDANG EKONOMI,
 KEUANGAN, PEMBANGUNAN, ASET DAN SDA
 SELAKU KETUA TIM KOORDINASI
 PERCEPATAN PELAKSANAAN PSN PROVSU



HARIANTO BUTAR-BUTAR, SE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680916 199503 1 005

KEGIATAN SOSIALISASI



Kegiatan Sosialisasi Percepatan Inventarisasi Pengadaan Tanah di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.



Kegiatan Sosialisasi Percepatan Invent Pengadaan Tanah Melalui Pemberdayaan Tim Koordinasi Percepatan PSN Sumut Bersama dengan Asisten Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Langkat



Dokumentasi kegiatan Sosialisasi di Kantor Camat Besitang terkait dengan Inventarisasi di Desa Halaban.



Sosialisasi juga dihadiri oleh Perangkat Desa Halaban dan juga dari Pemerintahan Kabupaten Langkat.



Dokumentasi kegiatan Sosialisasi bersama Masyarakat Desa Halaban juga dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Langkat beserta Jajaran Aparat Pemerintahan Kabupaten Langkat, yang diadakan di Ruang Pola Pemerintahan Kabupaten Langkat.

B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

1. Manfaat bagi Project Leader:

Selama proses pelaksanaan aksi perubahan project leader dapat mengaktualisasikan kepemimpinan melayani dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah diajarkan selama Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Gelombang 2 Angkatan IV Tahun 2023. Mampu mengendalikan pekerjaan di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan sehingga kualitas pelaksanaan Invent Pertanahan dapat memperoleh hasil yang maksimal dan meningkat.



C. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM AKSI PERUBAHAN

Pada komponen pengembangan kompetensi yaitu mengelola perubahan maupun perekat bangsa, dimana kegiatan pengembangannya dengan cara mengikuti pelatihan Change Leadership melewati media sosial seperti WhatsApps, maka diharapkan seseorang akan mampu mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif dalam mengelola perubahan. Melalui implementasi pengembangan kompetensi yang efektif, Project Leader dapat memastikan bahwa individu atau tim yang terlibat dalam pelaksanaa pengadaan tanah memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam proses invent pengadaan tanah. Dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan adalah melakukan koordinasi baik secara intern maupun ekstern agar pelaksanaan inventarisasi pengadaan tanah dapat digaungkan di wilayah Kabupaten Langkat khususnya di Desa Halaban, Kecamatan Besitang.



GALERI



Impelementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Menjadi Koordinator Pelaksana Invent Yang Baik.

Selain melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal, pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan ini adalah mengajak masyarakat dan aparat desa untuk menjadi anggota satgas yang baik. Yang harus dilakukan sebagai seorang coordinator invent adalah :

1. Membangun kepercayaan para pihak;

Mampu memanagerial antara aparat Desa, tim percepatan, tim invent dengan Masyarakat agar dapat saling membantu dan saling bekerjasama untuk percepatan inventarisasi pengadaan tanah di Desa Halaban.

2. Mengajak para pihak keluar dari ego sektoralnya;

Mengajak para pihak untuk tidak terjebak pada situasi saling mementingkan diri sendiri dan saling menunjukkan posisi atau kedudukannya, Mengingatkan para pihak bahwa Pembangunan jalan tol itu adalah untuk kemajuan dan meningkatkan perkembangan perekonomian di daerah mereka dan mendorong kepada seluruh pihak agar dapat saling membantu dan mendorong untuk lancarnya proses pengadaan tanah Jalan Tol di desa mereka.

3. Mendorong para pihak untuk aktif dan proaktif;

Tidak semua orang pada awalnya mau membantu pelaksanaan invent di desa mereka akan tetapi setelah dilakukan Langkah-langkah secara konfrenhensif seperti tersebut diatas maka akan dapat memotivasi dan mendorong Masyarakat untuk dapat membantu pelaksanaan invent pengadaan tanah tersebut.

4. Netralitas dan imparsialitas tidak berpihak dan tidak memiliki kepentingan terhadap invent yang dilakukan. Hal ini dapat meningkat kepercayaan Masyarakat terhadap besar nilainya ganti rugi yang akan diterima oleh Masyarakat berdasarkan perhitungan KJPP (Konsulat Jasa Penilaian Publik).

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Mata pelatihan pilihan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama karena organisasi dan pemerintahan memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat. Memahami bagaimana organisasi dan pemerintahan beroperasi dan dapat dikelola dengan baik dapat membantu dalam mengatasi berbagai masalah yang mungkin terjadi di masa depan dan juga memahami bagaimana organisasi

dan pemerintahan dapat dikelola secara efektif dan efisien, selain itu Memahami masalah gender dan sosial inklusi membantu orang untuk lebih menghargai perbedaan dalam masyarakat, dan mendorong keberagaman dan inklusivitas dalam interaksi sosial.

A. GEDSI

Penyusunan Aksi Perubahan ini memiliki keterkaitan pada materi GEDSI, dimana kesetaraan Gender dan sosial inklusi memastikan pada inventarisasi lahan didasarkan bahwa semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama, yang dari alokasi invent tanahnya masyarakat dapat memperoleh keuntungan yang adil dari hasil kegiatan tersebut. Tim satgas dapat berperan dalam pelaksanaan yang melibatkan masalah gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Dalam konteks ini, tim percepatan dapat membantu mencapai penyelesaian yang lebih inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan serta perspektif yang berbeda dari pihak-pihak lahannya yang terkena, termasuk perempuan, orang dengan disabilitas, dan kelompok marginalisasi lainnya diseluruh masyarakat.

Berikut adalah beberapa keterkaitan pelaksanaan invent dengan masalah dan hambatan dilokasi tersebut:

B. MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Sedangkan pada materi Manajemen keuangan negara dan sosialisasi inventarisasi memiliki keterkaitan dalam konteks penyelesaian hambatan dan masalah dalam pelaksanaan. Manajemen keuangan negara mencakup alokasi anggaran untuk berbagai program dan kegiatan, termasuk yang berkaitan dengan inventarisasi pengadaan tanah. Anggaran yang cukup dan efektif akan mendukung implementasi program inventarisasi yang lebih luas dan efisien. Ini memungkinkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas alokasi dana, melatih tim, dan menyediakan dukungan administratif untuk memfasilitasi penyelesaian pengadaan tanah secara benar. Dengan dukungan keuangan dari negara, program pengadaan tanah dapat dijalankan dengan biaya terjangkau atau bahkan gratis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Ini membuka aksesibilitas yang lebih besar bagi masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu secara finansial, untuk memahami proses percepatan inventarisasi sebagai alternatif penyelesaian percepatan pengadaan tanah di Desa Halaban. Kegiatan percepatan Inventarisasi memerlukan tim ahli ahli yang terlatih dalam mempercepat dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kendala-kendala dalam pekerjaan. Dengan dukungan keuangan negara, pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk tim yang profesional. Hal ini penting untuk memastikan kualitas inventarisasi dan meningkatkan kemampuan para tim dalam membantu pelaksanaan inventarisasi pengadaan yang tepat waktu. Penyelesaian inventarisasi tanah melalui tim percepatan cenderung lebih cepat daripada melalui jalur pengadaan seperti biasanya. Dalam jangka panjang, penyelesaian yang lebih cepat dapat mengurangi beban Pejabat Pembuat Komitmen dan biaya yang harus ditanggung oleh negara dalam pembaharuan penetapan lokasi. Sebagai hasilnya, manajemen keuangan negara dapat diarahkan ke

bidang lain yang juga memerlukan perhatian dan alokasi dana. Penyelesaian pengadaan tanah yang efektif melalui koordinasi dengan tim percepatan dapat menciptakan kepastian waktu penyelesaian invent pengadaan tanah Jalan Tol bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor dan pengembang. Keadaan ini berkontribusi pada iklim investasi yang lebih baik dan dapat mendorong pembangunan ekonomi. Lebih banyak investasi dan pembangunan ekonomi, pada gilirannya, dapat berdampak positif pada penerimaan negara dan manajemen keuangan yang lebih baik.

C. MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Pada materi manajemen pemerintahan yang efektif dapat memastikan bahwa system pengadaan tanah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Percepatan Pengadaan Tanah memiliki keterkaitan dengan fungsi pemerintahan dalam penyelesaian inventarisasi pengadaan tanah sebagai berikut:

1. Percepatan Inventarisasi Pengadaan Tanah merupakan bentuk penyelesaian alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai mekanisme percepatan penyelesaian inventarisasi yang lebih fleksibel dan efisien. Dalam beberapa kasus, hambatan atau sistem pengadaan tanah mungkin tidak menjadi pilihan yang ideal untuk menyelesaikan kendala-kendala dilapangan, karena prosesnya tidak menyentuh langsung ke masyarakat, dan sulit dipahami. Dalam hal ini, pemerintah dapat mempromosikan percepatan inventarisasi pengadaan tanah melalui koordinasi dengan tim [percepatan PSN Sumut sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih efektif dalam menyelesaikan percepatan invent pengadaan tanah.

2. Pemerintah memiliki peran dalam mensosialisasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan inventarisasi. Dalam konteks pengadaan tanah, pemerintah (tim percepatan PSN Sumut) dapat bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi atau mendukung percepatan pelaksanaan, memastikan bahwa semua pihak terlibat dan memiliki kesempatan dalam berkontribusi dan membantu tim. Dengan demikian, pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan dan mempromosikan hubungan yang harmonis antara para pihak.
3. Meskipun tugas tim percepatan ini bersifat sukarela, hasil dari proses pelaksanaannya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan atau mengembangkan kebijakan pemerintah terkait pengadaan tanah. Dalam beberapa hal, pemerintah dapat menggunakan cara yang didapat melalui koordinasi dengan tim percepatan sebagai landasan untuk membuat keputusan system kerja atau mengambil langkah-langkah penyelesaian yang lebih lanjut untuk pelaksanaan percepatan. Hal ini membantu memperkuat otoritas dan legitimasi keputusan pemerintah dalam konteks pengadaan tanah.
4. Percepatan pengadaan tanah juga dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pengadaan tanah dapat mengakibatkan masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya. Melalui percepatan inventarisasi, pemerintah dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian keterlambatan, memperkuat kemampuan negosiasi mereka, dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks pengadaan tanah. Ini dapat mempromosikan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam berperan aktif

untuk membantu pemerintah dalam percepatan pelaksanaan pengadaan tanah.

Dalam penerapan koordinasi dengan tim percepatan pengadaan tanah dapat juga sebagai mencari solusi penyelesaian sengketa atau keberatan dari Masyarakat yang tanahnya akan di invent. Pemerintah juga perlu memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung penggunaan dan pemberdayaan tim percepatan dalam suatu desa. Selain itu, pemerintah juga dapat memfasilitasi pelatihan dan pendidikan untuk tim invent dan tim percepatan yang akan terlibat dalam proses pelaksanaan invent guna memastikan keahlian dan kompetensi tim dalam menangani sengketa dan kendala-kendala yang timbul terhadap inventarisasi pengadaan tanah dapat terselesaikan dengan baik dan benar tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

BAB V

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. PENERAPAN STRATEGI KOMUNIKASI

Penerapan strategi komunikasi yang efektif dalam rangka pelaksanaan interasi pengadaan tanah sebagai solusi penyelesaian kendala keterlambatan invent juga dapat dilakukan dengan membangun pemahaman, memfasilitasi dialog, agar mencapai kefahaman yang saling mendukung di masyarakat. Dengan memastikan seluruh informasi mengenai aksi perubahan dapat diterima dengan baik melalui interaksi sosial, diseminasi dan diskusi yang menunjukkan bahwa aksi perubahan ini memiliki dampak positif terhadap kredibilitas instansi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.

Penerapan strategi komunikasi ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk invent pengadaan tanah yang sukses. Melalui komunikasi yang efektif, pemahaman yang lebih baik tentang pengadaan tanah yang mendasari kerja sama tim dengan masyarakat dapat tercapai, dan proses pengadaan tanah dapat menghasilkan kesejahteraan dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam membangun jejaring kerja dan kolaborasi dengan stakeholder terkait, Project Leader seringkali memanfaatkan berbagai forum dan media komunikasi antara lain :

1. Rapat – rapat baik secara intern maupun secara ekstern
2. Sosialisasi yang mengundang stakeholders ekstern maupun sosialisasi- sosialisasi secara masif pada forum yang diadakan stakeholders ekstern.
3. Whatsapp group yang beranggotakan stakeholder intern maupun ekstern,
4. Media sosial yang dikelola oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat sebagai wadah memberikan informasi kegiatan- kegiatan melaksanakan desiminasi dan publikasi.

5. Mengirimkan kemasing-masing Masyarakat dan menempelan Undangan dikantor desa terkait rapat dan musyawarah pengadaan tanah yang akan dilakukan di Kantor Desa yang terkena lokasi pengadaan tanah.

GALERI



Rapat pembahasan tata letak bidang tanah di Desa Halaban, berpedoman menggunakan alat dan aplikasi Global Position Service.

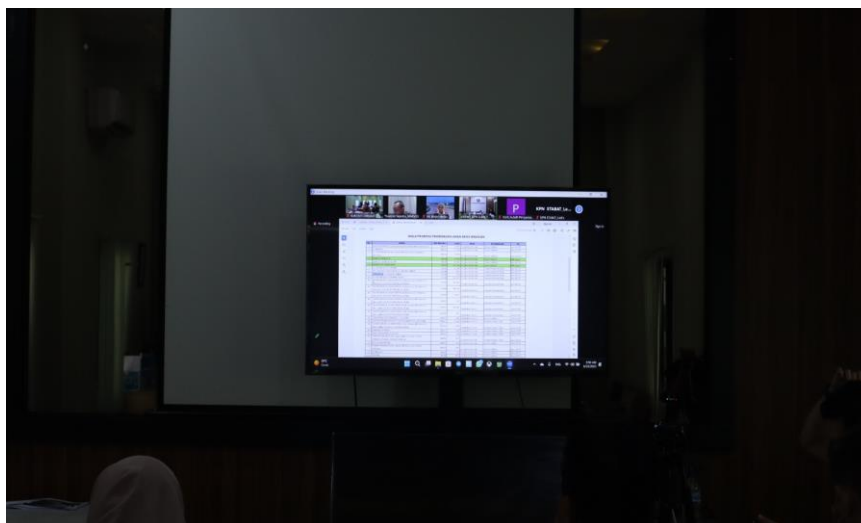


Rapat mendudukan titik koordinat Bersama Kementerian Maritim dan Investasi melalui aplikasi Zoom dalam rangka penentuan trase dan titik koordinat bidang tanah di Desa Halaban.

Dari serangkaian kegiatan dan komunikasi yang dilakukan oleh tim bersama dengan seluruh stakeholder, dihasilkan beberapa kesepakatan dan pemahaman oleh para stakeholder akan pentingnya percepatan invent sebagai suatu syarat untuk persyaratan tahap pembayaran uang ganti rugi. Sehingga memunculkan minat dan antusiasme dari para stakeholder khususnya kelompok stakeholder Latents untuk mendukung aksi perubahan.

Strategi yang dilakukan untuk memperoleh dukungan kelompok Latents ini adalah dengan memastikan seluruh informasi mengenai aksi perubahan dapat diterima dengan baik melalui upaya-upaya komunikasi sebagai berikut:

1. Interaksi melalui pendekatan dan komunikasi awal dengan kelompok stakeholder Latents dengan memanfaatkan forum komunikasi via Whatsapp untuk menyampaikan urgensi dari aksi perubahan dan dampaknya yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat;
2. Dengan melakukan diseminasi terhadap rencana implementasi aksi perubahan, dengan melibatkan kelompok stakeholder Latents yang memiliki tugas dan peran yang strategis terhadap keberhasilan aksi perubahan; dan
3. Diskusi baik dalam forum formal maupun informal dengan para Latents, dengan menunjukkan bahwa aksi perubahan ini memiliki dampak positif terhadap isu-isu yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama dengan para stakeholders.



Rapat secara Daring menggunakan aplikasi Zoom

B. KEBERHASILAN MENDAPAT DUKUNGAN AKSI PERUBAHAN

Dukungan aksi perubahan percepatan invent yaitu melalui koodinasi untuk percepatan dengan tim percepatan PSN Sumut dapat menjadi solusi yang efektif untuk penyelesaian kendala dan hambatan dilapangan. Percepatan pengadaan tanah adalah proses dimana pihak yang terkena lokasi pengadaan tanah bekerja sama dengan tim percepatan untuk mencapai terlaksananya invent dengan baik. Dukungan yang berhasil dikumpulkan baik dari intern maupun ekstern sangat penting bagi keberlangsungan aksi perubahan percepatan invent pengadaan tanah untuk terus mem brandingkan aksi perubahan ini sekarang dan di kemudian hari.

BAB VI

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN



Seluruh kegiatan jangka pendek telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan capaian output jangka pendek. Dalam implementasi aksi perubahan juga terdapat salah satu output kegiatan jangka menengah yang dapat dicapai pada tahapan jangka pendek. Untuk menjamin keberlanjutan aksi perubahan dan terwujudnya capaian output-output jangka pendek dan outcome jangka panjang, maka akan segera ditindaklanjuti pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada jangka menengah termasuk jangka panjang. Pada Aksi Perubahan dengan mengangkat tema percepatan invent pengadaaan tanah melalui pemberdayaan tim koodinasi percepatan PSN Sumut yaitu dengan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan kolaborasi antar tim inventarisasi sebagai suatu solusi penyelesaian keterlambatan invent yang ditujukan kepada masyarakat dan aparat Desa Pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, telah dilaksanakan sosialisasi-sosialisasi dan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi pada :

1. Kantor Gubernur Sumatera Utara
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
3. Kantor Kementerian PUPR Provinsi Sumatera Utara
4. Kantor Utama Karya dan Utama Karya Infrastruktur selaku pelaksana fisik
5. Kantor Camat Besitang
6. Kantor Desa Halaban
7. Kantor Dinas Pertanian dan :Perumahan Pemukiman Kabupaten Langkat

A. TINDAKLANJUT JANGKA MENENGAH

Untuk target pelaksanaan kegiatan di jangka menengah, lebih difokuskan pada Desa Halaban berikutnya menyesuaikan kegiatan di Kantor Desa tersebut baik kegiatan Koordinasi RT/RW maupun kegiatan lain yang diselenggarakan yang direncanakan akan dilaksanakan selama 5 bulan kedepan, dimana jumlah bidang tanah di Desa Halaban masih banyak yang belum dilakukan percepatan inventarisasi yang terkena lokasi pengadaan tanah.



B. TINDAK LANJUT JANGKA PANJANG

Untuk target pelaksanaan kegiatan jangka panjang direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan yaitu tahun 2024, dengan fokus kegiatan untuk mendorong komitmen PPK dan seluruh

stake holder, HK dan HKI baik secara intern maupun ekstern untuk terus menggunakan cara untuk percepatan invent dengan memberdayakan Tim Percepatan PSN Sumut sehingga menciptakan cara dan sistem di masyarakat dalam pelaksanaan percepatan invent pengadaan tanah di Desa Halaban.



BAB VII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Strategi pengembangan kompetensi yang dilakukan project leader selama 2 (dua) bulan terakhir terkait komponen integritas kerjasama, mengelola perubahan, khususnya untuk mendorong potensi pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam hari kerjasama sesuai kesepakatan antara mentor dengan project leader adalah sebagai berikut:

NO.	Kegiatan	Mitra Pelaksana	Jenis Pengembangan	Stake Holder Terkait
1.	Forum Koordinasi dan Konsultasi Tim Percepatan	Tim Percepatan PSN Sumut dan Satgas A dan B	Keterlibatan dalam forum dialog untuk percepatan invent	Pemda Kecamatan Desa Perangkat Desa
2.	Sosialisasi di Kantor Pertanahan ataupun di Kantor Camat dan Desa	Mentor Camat Kepala Desa Masyarakat	Teknik dan cara kerja untuk mempercepat Invent Pengadaan Tanah	Camat Kepala Desa Tokoh Masyarakat
3.	Rapat Evaluasi Kinerja terhadap pencapaian invent pengadaan tanah	- Mentor - Tim Percepatan - Panitia Pengadaan Tanah - Satgas A - Satgas B	Melakukan evaluasi dan mentoring terkait implementasi kegiatan dalam aksi perubahan	- Kakan - Ketua Satgas A - Ketua Satgas B
	Kegiatan	Mitra Pelaksana	Jenis Pengembangan	Stake Holder Terkait
4.	Rapat Progres Implementasi Aksi Perubahan Interen Seksi Pengadaan	Project Leader	Melakukan pengarahan terkait teknis	Tim Efektif

	Tanah dan Pengembangan		pelaksanaan aksi perubahan	
--	------------------------	--	----------------------------	--

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan tugas pada seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, terdapat 4 (empat) isu strategis, yaitu banyaknya kendala dalam pelaksanaan yang menyita waktu, banyaknya kesalahan dalam plotting bidang tanah dan banyaknya surat tanah/ alas hak yang diserahkan dari masyarakat, terbatasnya kewenangan tim inventarisasi tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat terkait pengambilan keputusan dan memerintah aparat pemerintahan dalam membantu percepatan, dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait pengadaan tanah dalam proses percepatan penyelesaian inventarisasi pengadaan tanah. Sehingga isu paling utama yang harus ditindaklanjuti dengan aksi perubahan adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait upaya untuk percepatan dalam proses inventur pengadaan tanah agar dalam pelaksanaannya di wilayah Desa Halaban dapat berjalan dengan optimal.

Peningkatan informasi kepada Masyarakat dan Kerjasama tim sebagai suatu solusi penyelesaian percepatan inventur di tanah masyarakat yang terkena lokasi pengadaan tanah dan juga Kerjasama antara tim percepatan PSN Sumut dengan aparat Desa Halaban sangat diperlukan baik bagi instansi yang terkait maupun bagi masyarakat serta aparat di kecamatan.

Dengan sosialisasi langsung dan Kerjasama tim yang baik, sistem inventur pengadaan tanah dapat mengalami perbaikan dalam penyelesaian inventur. Masyarakat akan lebih cepat memperoleh data hasil inventur tanah mereka, memahami prosesnya, dan merasa terlibat dalam penyelesaian inventur tersebut. Ini dapat mengurangi masa perpanjangan penlok yang terus berlanjut setiap tahunnya dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan inventur pengadaan tanah. Juga bermanfaat bagi organisasi (intern) dalam meningkatkan kinerja dan mutu pekerjaan.

B. REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pengadaan tanah ini, penulis telah membuat kesepakatan kerjasama tri angle antara Mentor (Kepala Kantor), Ketua Satgas A selaku pimpinan pengukuran bidang tanah serta pembuat peta bidang dan Ketua Satgas B selaku yang memimpin Invent yuridis, tegakan yang terdiri atas: alas hak atas tanah, luas bangunan dan jumlah tanaman yang ada diatas lahan yang terkena pengadaan tanah.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT**

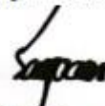
Jl. Imam Borjol No. 1A Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab Langkat Telp. (061) 8910577 email : kantahlangkat@gmail.com

PERNYATAAN DUKUNGAN

Pada hari ini tanggal Senin tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (07-08-2023), Kami yang bertanda tangan dibawah ini secara bersama-sama, kami menyatakan dukungan atas dilaksanakannya kegiatan aksi perubahan "PERCEPATAN INVENTARISASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL BINJAI LANGSA DI DESA HALABAN MELALUI PEMBERDAYAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROYEK STRATEGI NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA.

No.	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Syafrizal Pane, S.H. NIP.19660110 198603 1 003 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat	Mentor	
2.	Rahmat, S.H., M.H. NIP.19720523 199303 1 005 Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Ketua Satgas B	
3.	Ir. Menang Karo Karo NIP.19660114 199403 1 001 Kepala Seksi Survey Pemetaan	Ketua Satgas A	

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Langkat



Syafrizal Pane, S.H
NIP.19660110 198603 1 003

RENCANA TINDAK LANJUT

Tindak Lanjut Aksi Perubahan Peningkatan Pelayanan Publik

No.	Peminpin (Atasan Langsung)		Project Leader Yang Berkomitmen		
1.	Nama	: Syafrizal Pane, S.H.	Nama	: Rahmat, S.H.,M.H.	
2.	NIP	: 196601101986031003	NIP	: 197205231993031005	
3.	Jabatan	: Kepala Kantor	Jabatan	: Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	
4.	Unit Kerja	: Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat	Unit Kerja	: Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat	
No.	TAHAPAN DAN KEGIATAN		TARGET		
			Kuantitas/Out Put	Waktu	Biaya
JANGKA MENENGAH 6 BULAN					
1	Untuk target pelaksanaan kegiatan di jangka menengah, lebih di fokuskan pada Desa Halaban		Desa Halaban	6 Bulan	Tanpa Biaya
JANGKA PANJANG 24 BULAN					
2	Untuk target pelaksanaan kegiatan jangka Panjang direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan yaitu tahun 2024, dengan focus kegiatan untuk mendorong komitmen seluruh stake holder, baik secara intern maupun ekstern untuk terus melaksanakan koordinasi melalui pemberdayaan Tim Koordinasi Percepatan PSN Prov.Sumut		Desa Halaban	24 Bulan	Tanpa Biaya

PEJABAT PENILAI



SYAFRIZAL PANE, S.H.

NIP. 19660110 198603 1 003

Stabat, 7 AGUSTUS 2023



RAHMAT, S.H., M.H.

NIP. 19720523 199303 1 005



**S
E
K
I
A
N**

DAN

**T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H**